



## PEMENUHAN AKSES SANITASI, AIR BERSIH, DAN PENGELOLAAN SAMPAH DI WILAYAH PESISIR KOTA SURABAYA

### RINGKASAN EKSEKUTIF

Kawasan pesisir Surabaya, terutama Kampung Nambangan dan Cumpat, menghadapi tantangan serius terkait pemenuhan akses air bersih, sanitasi layak, dan pengelolaan sampah. Meskipun capaian kota secara umum menunjukkan kemajuan dengan 90,78% rumah tangga memiliki akses air minum layak dan 80,92% memiliki sanitasi layak, hanya 7,5% yang menikmati air minum aman dan 10,16% yang memiliki sanitasi aman (BPS, 2022). Kondisi ini menunjukkan kesenjangan yang cukup besar antara wilayah perkotaan dan pesisir, yang berdampak pada kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.

Hasil pemetaan lapangan di wilayah pesisir menunjukkan bahwa sekitar 61% rumah tangga menggunakan air yang relatif aman (tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna), sementara sisanya masih bergantung pada air beli eceran atau sumber tidak layak. Sebagian besar rumah tangga telah memiliki jamban, namun banyak yang tidak memenuhi standar sanitasi, dengan pembuangan limbah langsung ke laut atau tambak. Sistem IPAL komunal di beberapa lokasi tidak berfungsi optimal karena perawatan yang kurang dan minimnya partisipasi warga. Selain itu, tidak adanya sistem pengelolaan sampah yang memadai menyebabkan sebagian warga membuang sampah ke pantai atau selokan.

Analisis terhadap APBD Kota Surabaya tahun 2025 menunjukkan bahwa anggaran sektor WASH (Water, Sanitation, and Hygiene) mencapai sekitar 19,3% dari total belanja daerah, tersebar pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Pekerjaan Umum (PU). Namun, porsi terbesar dari anggaran tersebut masih diarahkan untuk infrastruktur fisik seperti jalan dan bangunan, sementara investasi langsung pada penyediaan air bersih, sistem sanitasi, dan pengelolaan sampah masih relatif kecil.

Tantangan utama yang dihadapi adalah ketimpangan layanan WASH antar wilayah, rendahnya keterlibatan masyarakat—khususnya perempuan pesisir—dalam pengambilan keputusan, serta belum optimalnya tata kelola dan koordinasi antar-dinas. Tanpa kebijakan yang inklusif dan partisipatif, ketimpangan layanan WASH dapat terus melebar.

Rekomendasi utama:

1. Perluasan cakupan air bersih dan revitalisasi IPAL komunal berbasis masyarakat.
2. Penguatan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis ekonomi sirkular.
3. Pengarusutamaan gender dan pelibatan perempuan dalam program WASH.
4. Penguatan tata kelola lintas sektor dan pembiayaan berkelanjutan berbasis data.



## PENDAHULUAN

Pemerintah berhasil meningkatkan akses air minum menjadi 90,78% dan sanitasi layak menjadi 80,92%, namun hanya 7,5% rumah tangga yang dapat mengakses air minum aman dan 10,16% rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi aman pada tahun 2016–2021 (BPS, 2022). Namun di sisi lain, kesenjangan akses sangat terlihat antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

**Peningkatan kualitas lingkungan hidup menjadi salah satu isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029**, dengan prioritas kebijakan adalah pemenuhan akses sanitasi air bersih dan peningkatan pengelolaan sampah yang terintegrasi.

Sebagai wilayah perkotaan, Surabaya tidak terlepas dari persoalan sampah. Produksi sampah di Kota Surabaya pada tahun 2023 tercatat sebesar 1.800 ton/hari, dengan volume sampah yang terangkut setiap harinya sebesar 1.536,77 ton atau 85,38%. Artinya, masih ada sampah yang belum terangkut untuk diproses lebih lanjut pada sarana dan prasarana seperti TPS atau TPA. Diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan pengelolaan sampah dengan melibatkan partisipasi masyarakat, peningkatan penegakan hukum, serta mendorong sirkular ekonomi dalam pengelolaan sampah.

**Salah satu masalah krusial adalah sistem sanitasi yang tidak memadai, terutama yang mempengaruhi perempuan dan anak perempuan di daerah pesisir.** Hal ini disebabkan faktor udaya dan sosial, termasuk perbedaan relasi gender.

Perempuan sering kali memikul tanggung jawab membersihkan dan membuang kotoran manusia, dan tata kelola sanitasi, persampahan, serta air bersih yang buruk menambah beban ekonomi bagi kelompok perempuan pesisir.

Proses pembangunan kawasan pesisir yang masih bersifat top-down, dirancang oleh kementerian dan pemerintah daerah tanpa melibatkan peran aktif masyarakat setempat—terutama perempuan—mengakibatkan kurangnya pengakuan terhadap kebutuhan dan kontribusi mereka. Hingga saat ini, pemerintah belum memberikan pengakuan status profesi perempuan nelayan.

## PERMASALAHAN SANITASI, AIR BERSIH, DAN PENGELOLAAN SAMPAH DI WILAYAH PESISIR KOTA SURABAYA

**Kampung Nambangan dan Cumpat merupakan kawasan pesisir utara Kota Surabaya dengan karakter masyarakat nelayan tradisional yang sangat bergantung pada sumber daya laut.** Namun, kondisi lingkungan, sanitasi, dan infrastruktur dasar di wilayah ini masih menghadapi beberapa masalah dan tantangan.

Dari hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan, masalah sanitasi dan air bersih menunjukkan bahwa sebagian besar warga telah memiliki jamban, tetapi banyak yang tidak memenuhi standar kelayakan. Sebagian jamban tidak memiliki pintu, ventilasi kurang, lantai licin, serta tidak ramah bagi anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Selain itu, sebagian besar limbah dialirkan langsung ke selokan, tambak, atau laut karena IPAL komunal dan tangki septik tank komunal yang tersedia tidak berfungsi atau tidak dimanfaatkan.

Keterbatasan akses air bersih juga masih menjadi temuan dalam pemetaan tersebut. Mayoritas warga mengandalkan air PDAM dan sebagian kecil menggunakan sumur gali atau membeli air eceran dengan biaya Rp. 25.000 – 300.000 per bulan. Selain keterbatasan akses, kualitas air juga masih menjadi masalah, hanya sekitar 61% air yang layak atau aman (tidak berbau, berasa, dan berwarna).

Selain masalah sanitasi dan air bersih, masyarakat pesisir di Nambangan dan Cumpat juga menghadapi masalah persampahan, dari hasil pemetaan di kedua kampung tersebut belum ada sistem pengelolaan sampah yang memadai. Banyak warga yang menimbun atau membuang sampah di tepi pantai. Hal ini terjadi karena tempat sampah yang ada tidak memenuhi dan juga karena pengangkutan sampah yang tidak rutin menyebabkan penumpukan sampah.



Tabel Ringkasan Masalah Kampung Pesisir Nambangan & Cumpat

Aspek	Permasalahan Utama	Dampak	Akar Penyebab
Sanitasi (Jamban & Limbah)	6% rumah belum memiliki jamban; sebagian jamban tidak layak; 60% limbah dibuang ke laut/selokan	Pencemaran, penyakit kulit & pencernaan	IPAL & septic tank komunal tidak berfungsi; rendahnya kesadaran & biaya perawatan
Air Bersih	Akses air terbatas, kualitas air rendah (39% berbau/berwarna/berasa)	Gangguan kesehatan, biaya tinggi	Sumber air tercemar, PDAM tidak lancar, minim sumur bor
Persampahan	Tidak ada pengelolaan sampah terstruktur	Penumpukan sampah, pencemaran pesisir	Keterbatasan armada, kurangnya fasilitas & kebiasaan buang sembarangan
Genangan & Rob	142 titik genangan, 18 kejadian rob (160 rumah terdampak)	Kerusakan rumah & septiktank, sanitasi gagal	Drainase buruk, sedimentasi, pasang tinggi laut
Kesehatan Lingkungan	Tingginya kasus batuk, pilek, TBC, asma, infeksi	Produktivitas menurun	Air & sanitasi tidak sehat
Infrastruktur Umum (MCK, Drainase, Air Pipa)	Banyak MCK rusak & tidak berfungsi; selokan tersumbat	Akses sanitasi terbatas, lingkungan kumuh	Minim perawatan & koordinasi antar lembaga
Ekonomi & Sosial	Pendapatan rendah, ketergantungan pada laut	Kerentanan ekonomi tinggi	Kurangnya diversifikasi usaha & pelatihan
Lingkungan Pesisir	Abrasi, sedimentasi, limbah perikanan	Degradasi ekosistem pesisir	Pengelolaan limbah belum optimal

**Perempuan di kawasan pesisir Nambangan dan Cumpat menghadapi beban ganda yang berat akibat buruknya kondisi air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah (WASH).**

Mereka harus menanggung tanggung jawab ganda di ranah domestik dan ekonomi, sambil berhadapan dengan infrastruktur dasar yang terbatas.

Dalam ranah domestik, perempuan bertanggung jawab atas pemenuhan air bersih, kebersihan rumah, dan kesehatan keluarga. Namun, akses air bersih yang

minim membuat pekerjaan rumah tangga lebih berat dan memakan waktu. Di sisi lain, mereka juga aktif membantu ekonomi keluarga melalui pengolahan hasil laut dan produk olahan ikan. Kondisi ini menciptakan beban kerja yang kronis dan tidak proporsional.

**Buruknya sanitasi dan drainase menyebabkan risiko penyakit kulit, infeksi saluran kemih, dan gangguan pernapasan meningkat, terutama bagi perempuan dan anak-anak.** Minimnya fasilitas MCK yang aman menimbulkan ancaman kekerasan berbasis gender dan rasa tidak aman.

Secara sosial, meski perempuan berperan penting dalam pengelolaan air rumah tangga, mereka jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait program WASH. Akibatnya, desain dan kebijakan



sering tidak memperhatikan kebutuhan spesifik mereka. Di sisi ekonomi, tingginya biaya air bersih menambah tekanan bagi rumah tangga nelayan miskin dan memperkuat lingkaran kemiskinan berbasis gender.

Namun, perempuan sebenarnya memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam menjaga kebersihan lingkungan dan ketahanan komunitas. Sayangnya, dukungan kelembagaan dan infrastruktur yang minim membuat peran ini kurang diakui secara formal.

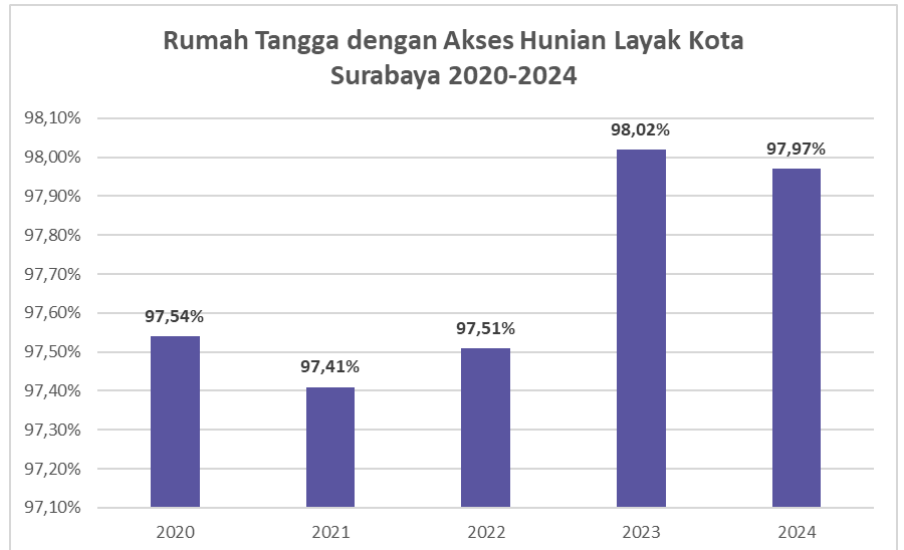
**KEBIJAKAN PERMASALAHAN SANITASI, AIR BERSIH, DAN PENGELOLAAN SAMPAH**

Lingkungan hidup merupakan salah satu permasalahan pembangunan yang dihadapi Kota Surabaya. **Dalam rancangan RPJMD Kota Surabaya 2025–2029, permasalahan yang dihadapi antara lain:**

1. Indeks kualitas lahan belum mengalami perubahan signifikan.
2. Kurangnya ketersediaan kawasan lindung dan hutan.
3. Kebutuhan pengawasan untuk memastikan pembangunan berorientasi ekonomi, sosial, dan lingkungan.
4. Limbah domestik tidak tersaring dengan baik.
5. Rendahnya kualitas air.
6. Tingginya polusi udara.
7. Keterbatasan teknologi pengelolaan sampah.

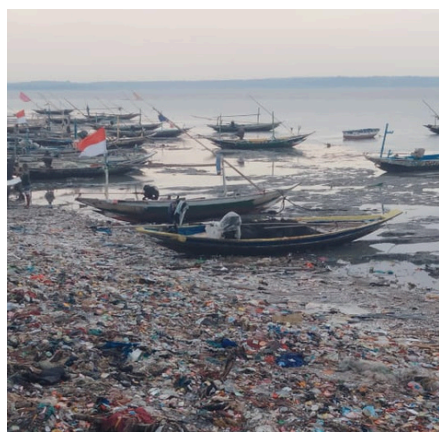
**Data spesifik menunjukkan persentase rumah tangga di Kota Surabaya yang memiliki akses hunian layak pada tahun 2024 mencapai 97,97%, menurun dari 98,02% pada tahun 2023.**

Artinya masih ada rumah tangga yang belum memiliki akses hunian layak yang mencakup kepemilikan rumah aman, akses sarana-prasarana dasar seperti air bersih dan sanitasi, serta lingkungan sehat.



**Berdasarkan RPJMD Kota Surabaya 2025–2029, visi pembangunan adalah “Transformasi Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan”.** Salah satu prioritasnya adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan pembangunan sosial. Optimalisasi pengelolaan sampah berbasis circular economy, penguatan drainase, penertiban kawasan kumuh, serta pengurangan risiko bencana menjadi prioritas utama.

Dalam misi ke-4, penyediaan air bersih dan sanitasi berkualitas menjadi prioritas dengan memperluas cakupan layanan PDAM, optimalisasi SPAM regional Umbulan, serta pembangunan IPAL. Pengelolaan sampah modern berbasis ekonomi sirkular akan diperkuat dengan partisipasi warga melalui bank sampah dan TPST berbasis Waste to Energy (WTE).

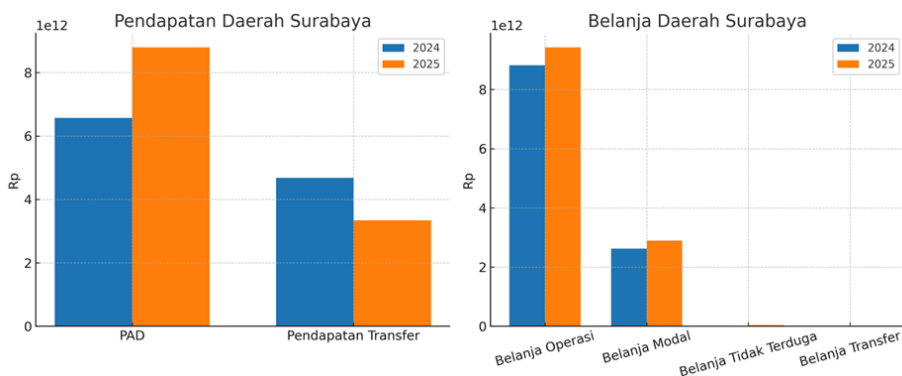




## POTRET ANGGARAN SEKTOR WASH KOTA SURABAYA

Berdasarkan data APBD Kota Surabaya tahun 2024–2025, total pendapatan daerah pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp11,24 triliun dan meningkat menjadi Rp12,14 triliun pada tahun 2025. Kenaikan ini didorong terutama oleh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik dari Rp6,57 triliun menjadi Rp8,79 triliun, atau berkontribusi sekitar 72,47% terhadap total pendapatan tahun 2025. Komponen terbesar PAD adalah pajak daerah yang melonjak dari Rp5,16 triliun menjadi Rp7,31 triliun (83,08% dari PAD), diikuti retribusi daerah sebesar Rp486,21 miliar, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp210,07 miliar, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp792,30 miliar. Sementara itu, pendapatan transfer mengalami penurunan dari Rp4,68 triliun menjadi Rp3,34 triliun, dengan mayoritas berasal dari pemerintah pusat sebesar Rp2,89 triliun dan transfer antar daerah sebesar Rp449,72 miliar.

Pada sisi belanja, total belanja daerah meningkat dari Rp11,44 triliun di tahun 2024 menjadi Rp12,35 triliun pada 2025. Belanja operasi menjadi komponen terbesar, yaitu Rp9,42 triliun (76,30% dari total belanja) yang didominasi oleh belanja pegawai sebesar Rp3,76 triliun dan belanja barang dan jasa sebesar Rp5,22 triliun. Pos belanja lainnya meliputi subsidi (Rp99,88 miliar), hibah (Rp338,35 miliar), dan bantuan sosial (Rp6,76 miliar). Belanja modal mencapai Rp2,89 triliun (23,40% dari total belanja), dengan alokasi terbesar untuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp1,46 triliun, diikuti pembangunan gedung dan bangunan sebesar Rp859,16 miliar. Belanja tidak terduga dan belanja transfer masing-masing relatif kecil, hanya sekitar 0,3% dari total belanja.



Keseimbangan anggaran menunjukkan defisit sebesar Rp214,64 miliar pada 2025, meningkat dibanding defisit Rp197,95 miliar pada 2024. Defisit ini ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp224,64 miliar yang sebagian besar berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, sementara pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah sebesar Rp10 miliar. Dengan demikian, pembiayaan netto menjadi positif sebesar Rp214,64 miliar, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan tetap terjaga.

Secara keseluruhan, APBD 2025 menunjukkan peningkatan kapasitas pendapatan daerah, terutama dari PAD yang mengalami pertumbuhan signifikan, meski terdapat penurunan pada pendapatan transfer. Struktur belanja masih didominasi belanja operasi, sementara belanja modal relatif kecil untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Tantangan ke depan adalah menjaga pertumbuhan PAD secara berkelanjutan, mengoptimalkan efisiensi belanja, serta mengelola defisit agar tidak membebani kapasitas fiskal daerah.

## PROFIL ANGGARAN WASH KOTA SURABAYA

Sektor Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) merupakan komponen penting dalam pembangunan perkotaan. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah mengalokasikan anggaran signifikan untuk mendukung peningkatan akses air bersih, sanitasi layak, pengelolaan limbah, drainase, dan perbaikan kawasan permukiman. Berikut adalah profil anggaran sektor WASH yang secara spesifik teralokasikan pada dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Surabaya pada APBD Tahun 2025.

Pada tahun 2025 Dinas Perumahan dan Permukiman mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 596.104.938.468 atau 4,83% dari total belanja daerah. Berdasarkan program dan kegiatan dinas Perkim fokus pada penataan bangunan, pengembangan perumahan, kawasan permukiman kumuh, PSU (prasarana sarana utilitas), serta penyelesaian ganti rugi tanah untuk pembangunan.



Berikut rincian program dan kegiatan WASH yang terdapat pada dinas Perkim

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
Penataan Bangunan	328.262.337.505
Pengembangan Jasa Konstruksi	629.803.242
Penataan Ruang (RTRW & sinkronisasi pemanfaatan ruang)	4.512.080.244
Pengembangan Perumahan (rusun/rumah khusus)	20.266.176.130
Kawasan Permukiman (peningkatan kualitas kumuh <10 Ha)	89.581.794.035
Perumahan & Kawasan Permukiman Kumuh	21.192.044.300
Peningkatan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU)	1.156.286.301
Penyelesaian Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan	89.205.870.896
Subtotal WASH Perkim	596.104.938.468

Sumber : APBD Kota Surabaya TA 2025, diolah

**Sementara dinas Pekerjaan Umum (PU) pada tahun 2025 ini mendapatkan alokasi belanja daerah sebesar Rp. 1.793.647.044.506 Atau 14,52% dari total belanja daerah.** Berdasarkan pemetaan terhadap program dan kegiatan WASH pada dinas PU Kota Surabaya mendapatkan alokasi sebesar Rp. 1.653.276.140.793 dengan fokus pengelolaan sumber daya air, sistem air limbah domestik, sistem drainase, pembangunan infrastruktur permukiman startegis, dan penyelenggaraan jalan.

Berikut rincian program dan kegiatan WASH pada dinas Pekerjaan Umum Kota Surabaya :

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA & bangunan pengaman pantai/sungai)	51.297.298.237
Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	7.140.325.823
Pengelolaan & Pengembangan Sistem Drainase	881.484.794.323
Pengembangan Permukiman di Kawasan Strategis	2.193.755.882
Penyelenggaraan Jalan (akses layanan publik & utilitas)	711.160.966.528
Subtotal WASH PU	1.653.276.140.793

Sumber : APBD Kota Surabaya TA 2025, diolah



Berdasarkan program dan kegiatan yang berorientasi pada sektor WASH pada dinas Perkim dan PU masih didominasi untuk pembangunan infrastruktur fisik (bangunan dan jalan dibandingkan dengan layanan langsung WASH (air minum dan sanitasi). Anggaran terbesar untuk infrastruktur fisik ini adalah untuk penataan bangunan dan jalan (Dinas Perkim 328 miliar, dan Dinas PU Rp. 711 miliar).

Sementara anggaran untuk pengelolaan air limbah dan drainase, alokasi sistem air limbah domestik sebesar Rp. 7,1 miliar relatif kecil dibanding kebutuhan kota besar. Namun alokasi untuk drainase cukup besar Rp. 881,4 miliar menunjukkan komitmen terhadap pengendalian banjir dan sanitasi lingkungan. Sebagai catatan, dalam program dan kegiatan yang ada di dinas Perkim dan PU belum ada alokasi eksplisit untuk penyediaan air minum/pipa PDAM, yang menjadi tantangan utama sektor WASH.

## USULAN KEBIJAKAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan analisis permasalahan, berikut adalah rekomendasi kebijakan:

### A. Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak

- Memperluas cakupan layanan PDAM dan optimalisasi SPAM regional di wilayah pesisir.
- Membangun dan memperluas IPAL komunal/domestik dengan pengelolaan berbasis masyarakat.
- Menyediakan program subsidi sambungan rumah bagi MBR di pesisir.
- Menerapkan sistem monitoring kualitas air secara real time.

### B. Pengelolaan Sampah Terintegrasi dan Circular Economy

- Meningkatkan fasilitas TPST berbasis WTE di wilayah pesisir.
- Memperkuat bank sampah dan TPS3R berbasis partisipasi warga.
- Menegakkan hukum terkait pembuangan sampah ilegal dan memberi insentif bagi pengurangan timbulan sampah.
- Mengintegrasikan pengelolaan sampah laut melalui patroli, edukasi, dan perangkap sampah di muara.

### C. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Pesisir

- Melibatkan perempuan pesisir dalam perencanaan kebijakan air, sanitasi, dan sampah.
- Memberikan pengakuan status profesi perempuan nelayan.
- Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan berbasis pengelolaan sampah bagi perempuan.
- Menyediakan fasilitas sanitasi ramah perempuan di kawasan pesisir.

### D. Tata Kelola dan Pembiayaan Berkelanjutan

- Mengintegrasikan perencanaan lintas sektor antar-dinas terkait.
- Menetapkan alokasi anggaran WASH yang memadai dan transparan.
- Mengembangkan kemitraan publik-swasta-masyarakat (PPP).
- Menggunakan teknologi tepat guna dan inovasi digital untuk pemantauan layanan.

## PENUTUP

Pemenuhan akses sanitasi layak, air bersih, dan pengelolaan sampah di wilayah pesisir Kota Surabaya merupakan tantangan sekaligus peluang strategis. Meskipun capaian telah menunjukkan kemajuan, kesenjangan layanan—terutama di wilayah pesisir—masih memerlukan perhatian serius. Kebijakan yang terintegrasi, berbasis data, berkeadilan gender, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan. Upaya ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat pesisir.

Dengan optimalisasi sumber daya, penerapan teknologi tepat guna, dan dukungan anggaran memadai, Kota Surabaya berpotensi menjadi contoh kota pesisir yang mengelola sanitasi, air bersih, dan sampah secara modern, efisien, dan inklusif. Komitmen bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat akan memastikan transformasi menuju “Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan” dapat terwujud, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.